

Implementasi Praktik Kerja Industri Melalui Jaringan Kerjasama Antara Sekolah dengan Industri

Najih Gilang Ramadhan¹, Syamsul Hadi², Rina Rifqie Mariana³

¹ Pendidikan Kejuruan-Universitas Negeri Malang

² Teknik Mesin-Universitas Negeri Malang

³ Teknologi Informatika-Universitas Negeri Malang

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 09-02-2021

Disetujui: 22-04-2021

Kata kunci:

work practice;
cooperation;
industrial school;
praktik kerja;
kerjasama;
sekolah industri

ABSTRAK

Abstract: The effectiveness of administering vocational education and training programs depends on the cooperation with DU / DI. The cooperative relationship between schools and industry is generally held to support the process of forming the learners' competencies to produce the quality of graduates that are in accordance with industry needs. The purpose of this study was to determine the implementation of industrial work practices through the collaboration between schools and industry in achieving the goals of vocational education. This study used a qualitative approach with the type of multi-case research which took the research sample of two vocational schools in Jember Regency, Ambulu District, which had different backgrounds. The results of the study explained that the implementation of internships through collaboration between schools and industry consisted: (1) internship planning; (2) Guidance of apprenticeship; and (3) apprenticeship assessment.

Abstrak: Efektivitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kejuruan bergantung pada kerja sama dengan DU/DI. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan industri umumnya di selenggarakan sebagai penunjang proses pembentukan kompetensi siswa sehingga menghasilkan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi praktik kerja industri melalui jaringan kerjasama antara sekolah dengan industri dalam pencapaian tujuan pendidikan kejuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian multi kasus yang mengambil sampel penelitian dua SMK di Kabupaten Jember Kecamatan Ambulu yang memiliki perbedaan latar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi prakerin melalui jaringan kerjasama antara sekolah dengan industri terdiri dari (1) perencanaan prakerin; (2) pembimbingan prakerin; (3) penilaian prakerin.

Alamat Korespondensi:

Najih Gilang Ramadhan
Pendidikan Kejuruan
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang
E-mail: najihgilangramadhan4@gmail.com

Sekolah Menengah Kejuruan adalah lembaga satuan pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusan yang handal dan kompeten dalam kesiapan bekerja (Lembar Lepas Setneg, 1990). Hal yang sama juga dinyatakan (Amrozi & Mukhadis, 2011) pada dasarnya SMK merupakan pengembangan dari keterampilan, kebiasaan kerja, pemahaman, sikap, dan pengetahuan agar siap terjun ke dunia kerja nyata. Kondisi empirik dilapangan nyatanya terdapat kontradiktif dengan uraian di atas, data Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), Jumlah tamatan SMK yang tidak bekerja atau tidak diterima di DU/DI saat ini masih mendominasi dan sekaligus sebagai penyumbang tertinggi. Senada dengan penjelasan tersebut (Jatmoko, 2013) menyatakan satu diantara enam lulusan SMK masuk kategori menganggur. Selanjutnya, disampaikan oleh (Saroni, 2017) Banyaknya kesempatan kerja di negeri ini, hanya saja keterbatasan keahlian sumber daya manusia yang menjadi kendala, keahlian SDM masih rendah sehingga jabatan penting dalam pekerjaan selalu dipercayakan kepada orang lain terutama warga negara asing. Menurut (Kolmos & Holgaard, 2018) Organisasi Profesional dan Internasional telah menekankan bahwa terdapat kesenjangan keterampilan antara pendidikan dan pekerjaan. Pendapat tersebut juga di dukung (Suleman, 2016) bahwa pengusaha menemukan lulusan kurang siap untuk di pekerjakan di industri. (Reid, 2015; Yoto & Widiyanti, 2017) (Reid, 2015) menjelaskan Satu hal yang dibutuhkan oleh industri adalah sumber daya manusia yang terdidik, handal, yang mampu menghadapi tantangan. Hal ini mengakibatkan ketidaktertarikan industri dalam merekrut SDM dari Indonesia, terutama lulusan SMK.

Adanya ketidaksesuaian (*miss match*) antara realita dilapangan dengan tujuan yang tertuang dalam pembukaan undang-undang mengindikasikan bahwa lulusan SMK belum memenuhi kriteria dunia kerja. ketidaksiapan lulusan untuk bekerja secara tidak langsung memberi efek domino terhadap dunia industri. Pasalnya, industri harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja sebelum bekerja. hal ini membuat pihak industri harus menganggarkan biaya tambahan

selain anggaran internal. Menurut (Stevani & Yulhendri, 2015) pendidikan kejuruan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh sekolah kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan dunia kerja, sehingga kesiapan kerja peserta didik menjadi kurang. Oleh karena itu, mutu pendidikan dan relevansi kelulusan dengan kebutuhan konsumen perlu mendapat perhatian secara serius dalam menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dengan cara berkerjasama dengan pihak industri terkait. Salah satu bentuk kerjasama pihak sekolah dan industri adakan kegiatan praktik kerja industri atau prakerin. Prakerin merupakan proses pendidikan kejuruan yang memadukan program pendidikan sekolah dengan program penguasaan keahlian dunia industri (Oktaviastuti, Dardiri, & Nindyawati, 2016) (Ponnan & Ambalavanan, 2014). Keberadaan praktek kerja industri (prakerin) dibutuhkan sebagai sarana latihan yang tepat bagi siswa dalam mengenal dunia industri. Pelaksanaan kegiatan prakerin dapat berjalan dengan sukses, saat dunia industri dan pihak sekolah memberikan pembekalan secara maksimal. Secara tidak langsung saat siswa melakukan prakerin, akan mendalami kompetensi yang dimiliki serta mendapat motivasi oleh pembimbing dan lingkungan prakerin agar menjadi pekerja yang dibutuhkan industri.

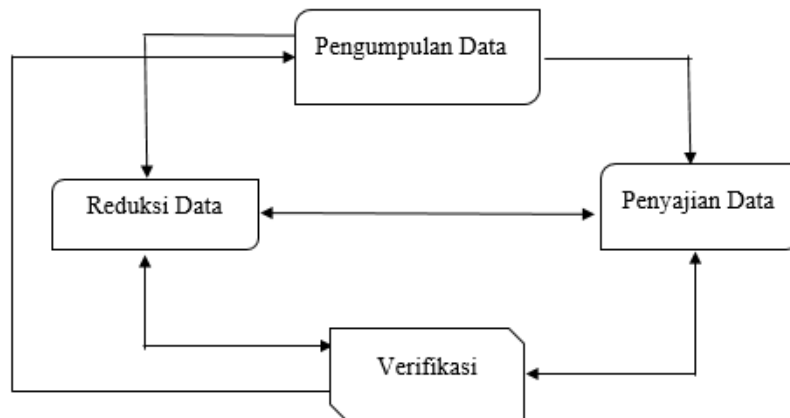
Bentuk kerjasama sekolah dengan industri menurut (Sunardi, 2017) dan (Widiyanti, Solichin, & Yoto, 2017) terdapat Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sejalan dengan pendapat tersebut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang: Standar Pengelolaan Pendidikan, yang meliputi tiga hal (1) Perencanaan Program; (2) Pelaksanaan Rencana Kerja; (3) Pengawasan atau Evaluasi. Pada konteks praktek kerja idustri, Perencanaan dalam prakerin adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Maryati (2014) mengatakan bahwasannya perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi penentuan tujuan dan menentukan cara pencapaian tujuan. Agar kegiatan dalam bekerja berjalan secara baik maka selain perencanaan diperlukan pengawasan yang sesuai dengan standard operation procedure (SOP). Dengan perencanaan yang baik maka akan menentukan keberhasilan peserta prakerin. Pada konteks prakerin, pelaksanaan rencana kerja dapat diimplementasikan dari proses pembimbingan siswa selama melaksanakan prakerin. Pembimbingan saat prakerin memiliki fungsi dan peranan dalam menentukan keberhasilan peserta prakerin. Sistem pembimbingan saat prakerin difasilitasi oleh guru sebagai pembimbing akademik dan instruktur sebagai pembimbing di lapangan. Upaya peningkatan mutu pendidikan, pengajaran, dan pemberian keterampilan peserta didik dapat ditekankan pada peningkatan kualitas kinerja instruktur (Drucker, 1997). Namun sebaliknya, semakin rendah bimbingan di industri saat siswa melaksanakan prakerin, maka semakin rendah sikap kerja siswa (Efendi, Sutadji, & Mukhadis, 2012). Selain pelaksanaan yang dapat diimplementasikan sebagai pembimbingan, evaluasi juga dapat diimplementasikan sebagai proses penilaian prakerin. Penilaian prakerin adalah kegiatan yang tidak kalah penting untuk dilakukan. Selain sebagai penghargaan terhadap siswa juga sebagai bentuk nyata partisipasi siswa di dalam organisasi industri. Pelaksanaan penilaian kinerja yang tepat harus dilaksanakan dengan rutin dan teliti, kegiatan siswa harus selalu diperhatikan, diamati, dan dinilai oleh pembimbing yang berwenang di industri. Kedudukan sebagai evaluator mengharuskan mereka melakukan penilaian dan memiliki pengetahuan tentang evaluasi, Teknik, dan cara penilaian.

Sintaks pengelolaan prakerin sebagaimana dijelaskan di atas, nyatanya tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Kajian berawal dari permasalahan ketidak puasan siswa praktikan SMK 1 M Ambulu terhadap pelaksanaan dan hasil yang didapat siswa khususnya di jurusan Teknik Otomotif. Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa praktikan yang pernah melaksanakan prakerin di industri pada tahun 2018, siswa tidak mendapat informasi detail mengenai prosedur pelaksanaan maupun penilaian kinerja yang diterapkan. Fakta lain juga di dukung dari salah satu pihak industri yang menjadi tempat prakerin siswa, bahwa dari hasil wawancara pada bulan maret 2019 pihak industri tidak mendapat informasi secara detail tentang prosedural prakerin terutama dari perencanaan kegiatan siswa, pembimbingan maupun penilaian. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan prakerin masih belum dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian (Jannah, Suswanto, & Handayani, 2016) yang menyatakan pelaksanaan prakerin dapat berjalan baik dari awal persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi, maka dapat diketahui pula besar kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja. Sementara itu, menurut (Sonhadji 1998) dalam pelaksanaan prakerin terdapat kendala-kendala, seperti (1) guru pembimbing belum berfungsi secara optimal di industri, (2) rendahnya manajemen pengelolaan pelatihan siswa oleh industry, (3) instruktur di industri banyak yang tidak memenuhi persyaratan serta belum berperean efektif dan (4) siswa SMK yang akan lulus dan sedang melakukan praktik belum menampakkan kesiapan yang baik dalam dunia kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui dan mengungkap lebih lanjut dan mendalam tentang implementasi kerjasama antara sekolah dengan industri dalam praktek kerja industri mulai dari perencanaan hingga evaluasi pada sekolah jurusan teknik otomotif di kabupaten Jember kecamatan Ambulu yang menjadi sekolah favorit serta SMK yang telah bekerja sama dengan MPM sebagai objek penelitian dengan judul: implementasi praktik kerja industri melalui jalinan kerjasama antara sekolah dengan industri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan mengkaji dan mendeskripsikan tentang implementasi kerjasama antara sekolah dengan industri dalam prakerin sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengamati dan mengumpulkan informasi. Di dalam penelitian kualitatif peneliti di tuntut bersikap aktif dan memiliki keterampilan tinggi (Jarvie, 2012). Jenis penelitian ini merupakan Studi kasus dengan menekan pada pengungkapan secara rinci dan mendalam terhadap suatu objek, peristiwa datau kejadian. Penelitiannya sendiri dilakukan di SMK P dan SMK M Kab Jember. Alasan mengambil SMK tersebut untuk penelitian karena SMK tersebut memiliki keunikan masing-masing seperti SMK P yang menjadi sekolah favorit di wilayahnya dan SMK M yang menjalin kerjasama dengan MPM Honda. Langkah-langkah Penelitian terdapat observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data penelitian (Bailey, 2013).

Pertama, Observasi Partisipan bertujuan untuk memperkuat data, terutama aktivitas pembelajaran. Teknik observasi menggunakan observasi *non*-partisipan, artinya peran peneliti hanya mengamati, dan tidak melibatkan diri secara langsung dengan orang atau kegiatan yang diteliti, yaitu: mengamati secara langsung tentang pelaksanaan kerjasama SMK dan industri keahlian teknik otomotif dengan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor yang bekerja sama dengan industri. *Kedua*, dengan tidak membuat suatu struktur pertanyaan yang kaku, penelitian ini menggunakan teknik *interview* tidak terstandar. *Ketiga*, studi dokumentasi pada penelitian meliputi studi kerjasama, rekaman pelaksanaan, dan foto-foto kegiatan. Berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian, sumber data penelitian ini terbentuk dengan dua jenis, yaitu (1) sumber data utama, meliputi hasil wawancara mendalam dengan informan dan (2) sumber daya pendukung, meliputi hasil dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti gambar, check list, foto, observasi catatan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian terdapat beberapa langkah, meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.



Gambar 1. Teknik Analisis Data

Pengecekan keabsahan data menggunakan tiga metode, yaitu triangulasi data, pengecekan anggota, dan audit internal. Triangulasi data dilakukan dengan cara analisis komparatif. Analisis komparatif dilaksanakan menggunakan cara mensinkronkan data dari hasil wawancara dengan data hasil dari observasi atau dokumentasi, serta membandingkan informasi dari narasumber yang satu dengan narasumber lainnya. Selanjutnya pengecekan anggota dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meminta kepastian kepada partisipan terkait temuan. Partisipan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber kunci dan narasumber pendukung. Partisipan diminta untuk memeriksa temuan. Temuan tersebut diperiksa dari segi realitas dan kelengkapan deskripsi temuan, keakuratan tema dalam temuan, serta keadilan dan kerepresentatifan temuan.

HASIL

Implementasi Praktek Kerja Industri Melalui Jalinan Kerjasama Antara Sekolah Dengan Industri di SMK P

Dalam implementasi di lapangan kerjasama antara sekolah dengan industri melalui program prakerin dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya perencanaan, pembimbingan, dan penilaian. Dari tahapan tersebut terdapat sub-indikator dari masing-masing yaitu (1) perencanaan terdapat pemilihan kompetensi, penetapan DUDI, penyusunan program, pembekalan dan penetapan pembimbing; (2) pembimbingan terdapat penyusunan jurnal, monitoring dan dokumentasi portopolio; (3) penilaian terdapat penilaian pembimbing, sertifikat, dan pelaporan nilai.

Pemilihan kompetensi belum terlaksana dengan berbagai masalah yaitu sekolah sudah berupaya mengundang pihak industri untuk membahas terkait pelaksanaan prakerin namun DUDI tidak pernah menghadiri dengan asumsi mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan, kurangnya komunikasi antara sekolah dengan industri dan ketidak beranian sekolah dalam memberikan arahan kepada industri dalam kebutuhan pembelajaran sesuai pemilihan kompetensi. Penetapan industri sebagai tempat prakerin hanya berlandaskan kerjasama lama, tidak ada tolok ukur kompetensi apa yang nantinya akan di pelajari siswa di industri atau hal-hal lain dan terdapat temuan pada penetapan industri yang kurang sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan.

Penyusunan program prakerin terdapat kerjasama dengan industri seperti urutan waktu pelaksanaan. Namun terkait program-program seperti topik-topik pembelajaran atau pekerjaan tidak terdapat kerjasama dikarenakan sekolah yang tidak berani terlalu menuntut ke industri yang di takutkan akan keengganan industri dalam kerjasama kedepan. Tidak terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri dalam proses pembekalan. Artinya pada saat proses pembekalan hanya pihak sekolah yang memberikan wawasan terkait alur pelaksanaan prakerin dan di dalam penyampaian tersebut tidak terdapat penyampaian proses penilaian yang dilakukan pembimbing, karena siswa sangat memerlukan informasi tersebut agar nantinya dapat di pelajari dan sebagai tolok ukur kemampuannya. Dalam menentukan pembimbing, sekolah tidak terdapat ketentuan kusus seperti kesesuaian kompetensi antara pembimbing dan yang di bimbing. Hal yang serupa juga terdapat pada penetapan pembimbing industri, dengan ketidak adanya

aturan kusus untuk menjadi pembimbing. Akan tetapi, apabila industri memiliki struktur organisasi atau manajemen seperti kepala bengkel maka kepala bengkel tersebut yang biasanya dijadikan pembimbing.

Terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri dalam penyusunan jurnal seperti sekolah yang telah menyediakan bentuk format yang nantinya dapat di isi oleh siswa dan pembimbing industri yang memastikan akan keterlaksanaannya. Di sisilain bentuk format yang di sediakan sekolah tidak terdapat target-target pembelajaran di industri yang artinya hanya format atau tabel kosong. Kegiatan monitoring sendiri dilakukan dengan bekerjasama antara sekolah dengan industri. kerjasama tersebut seperti komunikasi antara pembimbing sekolah dengan pembimbing industri dalam hal apa yang memang perlu di sampaikan terkait monitoring. Dalam kegiatan ini terdapat keteralihan proses atau prosedur-prosedur yang dilakukan dengan harapan kemaksimalan hasil monitoring. Terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri dalam pembuatan dokumentasi portopolio seperti sekolah yang memberikan pemahaman tentang proses pembuatan dokumen dan industri yang memastikan keterlaksanaan serta melihat kesesuaian isi dengan realita yang didapatkan di industri.

Proses pelaksanaan penilaian terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri seperti sekolah yang telah menyediakan bentuk formatnya dan industri sebagai penilai. Namun, pada saat proses penilaian terdapat temuan bahwa pembimbing industri memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat mengisi format nilai sendiri dan pada saat pengisiannya pembimbing menuturkan kepada siswa untuk tidak melebihi atau mengurangi artinya sesuai apa yang dirasa oleh siswa tersebut. Dalam pemberian sertifikat hasil pelaksanaan prakerin terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri seperti sekolah yang menyediakan bentuk sertifikat dengan isi nilai yang didapatkan di industri dan industri yang memberikan tanda seperti stempel industri. dengan kata lain pemberian sertifikat hasil prakerin telah di berikan.

Implementasi Praktek Kerja Industri Melalui Jalinan Kerjasama antara Sekolah dengan Industri di SMK M

Dalam implementasi di lapangan kerjasama antara sekolah dengan industri melalui program prakerin dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya perencanaan, pembimbingan, dan penilaian. Dari tahapan tersebut terdapat sub-indikator dari masing-masing, yaitu (1) perencanaan terdapat pemilihan kompetensi, penetapan DUDI, penyusunan program, pembekalan dan penetapan pembimbing; (2) pembimbingan terdapat penyusunan jurnal, monitoring dan dokumentasi portopolio; (3) penilaian terdapat penilaian pembimbing, sertifikat dan pelaporan nilai.

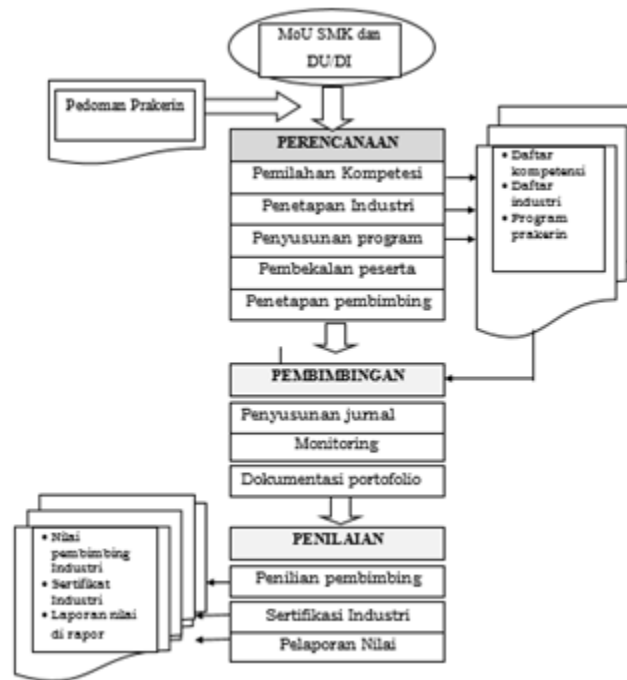
Pemilihan kompetensi terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri seperti indutri yang telah menyediakan silabus peluang pembelajaran yang nantinya dapat di pilih sekolah. Selain itu pembimbing sekolah juga mengupayakan pemanfaatan kegiatan monitoring untuk di jadikan masukan-masukan terkait pembelajaran apa yang harus di tekankan pada kompetensi tertentu. Sekolah dalam menentukan industri sebagai tempat prakerin terdapat pengajuan awal kepada main dealer dengan jumlah serta nama siswa yang dikirimkan melalui email. Selanjutnya main dealer mengirimkan nama-nama industri untuk di jadikan tempat prakerin dan terdapat cara sekolah dalam menentukan tempat prakerin seperti melihat aspek afektif, kognitif dan psikomotorik.

Penyusunan program prakerin terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri. kerjasama tersebut terdapat kesepakatan pelaksanaan urutan waktu dari awal sampai akhir prakerin dan terdapat program seperti kompetensi pembelajaran yang telah di pilih sekolah untuk di pelajari, namun peluang kompetensi pembelajaran yang di dapatkan sekolah tidak di jamin oleh industri akan keterlaksanaannya. Pelaksanaan pembekalan dilakukan tanpa melibatkan industri yang berarti tidak terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri saat proses pembekalan berlangsung. Dalam penyampaiannya juga sekolah tidak menyampaikan terkait alur proses penilaian. Pihak sekolah dalam menentukan pembimbingnya terdapat pembagian rata terhadap semua guru yang bersedia. Artinya tidak ada ketentuan kusus dalam menentukan pembimbing sekolah dan hal tersebut mengakibatkan adanya ketidak sesuaian kompetensi antara pembimbng dan yang di bimbing. Sedangkan penetapan pembimbing di industri juga tidak ada ketentuan kusus, akan tetapi realitanya pembimbing prakerin selalu kepala bengkel. Terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri seperti industri yang telah menyediakan peluang pembelajaran sehingga sekolah dapat membuat format jurnal sesuai dengan peluang pembelajaran yang ada di industri. keterangan pembelajaran yang di tulis siswa pada jurnal realitanya juga terdapat siswa tidak menjadi pelakunya dalam proses pekerjaannya artinya siswa hanya sekedar mendampingi mekanik saat proses pekerjaannya.

Pembimbing sekolah menjalankan monitoring dengan waktu semestinya sesuai jadwal. Apabila terdapat permasalahan terkait monitoring maka pembimbing industri dapat menginformasikan lewat mediaa sosial. Untuk pelaksanaannya sendiri, tidak ada prosedur tertentu atau format yang menunjukkan apa saja yang di lakukan saat monitoring. Pelaksanaan pembuatan dokumentasi portopolio terdapat sekolah yang memberikan arahan awal saat pembimbingan serta siswa dapat berkonsultasi atas apa yang menjadi permasalahannya. Untuk pembimbing industri kontribusi dalam pelaksanaannya adalah memastikan keterlaksanaan atau kesesuaian isi dari apa yang mereka dapatkan.

Proses penilaian dilakukan oleh pembimbing industri dengan prosedur atau bentuk format yang dibuat oleh sekolah. Dalam pelaksanaannya sendiri pembimbing industri meminta pada teman mekanik yang pada dasarnya mendampingi siswa saat proses pelaksanaan prakerin. Tidak terdapat pemberian sertifikat dari sekolah maupun industri. Pada dasarnya dalam kerjasama awal antara sekolah dengan industri dalam pemberian sertifikat tersebut terdapat kesepakatan bahwa sekolah di pekerkenankan untuk memberikan sertifikat hasil prakerin, namun sekolah menjelaskan pemberian sertifikat terdapat pada ujian kompetensi. Pelaporan nilai hasil prakerin, terdapat kombinasi antara nilai yang di dapatkan dari prakerin dengan nilai pembelajaran di sekolah.

terkait hal ini acuan yang dipegang sekolah untuk dijadikan standart kelulusan adalah nilai sikap, namun sekolah juga tidak menyampingkan nilai pengetahuan dan keterampilannya dalam pelaporan tersebut.



Gambar 2. Model Kerjasama Sekolah dengan Industri

PEMBAHASAN

Implementasi Praktek Kerja Industri Melalui Jalinan Kerjasama Antara Sekolah dengan Industri

Kerjasama sekolah dengan industri dalam perencanaan praktek kerja industri

Kerjasama sekolah dengan industri dalam perencanaan terbagi menjadi lima sub-indikator yaitu pemilihan kompetensi, penetapan DUDI, penyusunan program prakerin, pembekalan peserta, penetapan pembimbing. (Dikmenjur, 2018), (Kolmos & Holgaard, 2018) pemilihan kopetensi adalah proses analisis kompetensi dasar dan topik pembelajaran atau pekerjaan dari mata pelajaran pada kompetensi keahlian, yang kemudian memetakannya berdasarkan kemungkinan atau peluang dilaksanakannya pembelajaran topik-topik tersebut di masing-masing industri yang menjadi institusi pasangan. Oleh karena itu kerjasama antara sekolah dengan industri adalah upaya dalam meningkatkan produktivitas dengan wujud penyiapan lulusan yang berkualitas secara kompetensi (Imam 2014).

Dari keterangan di atas kerjasama sekolah dengan industri sangat di perlukan agar pemilihan kompetensi tersebut dapat terlaksana. Hasil studi penelitian di SMK M dalam pemilihan kompetensi industri terdapat kontribusi dengan memberikan pilihan peluang pekerjaan yang nantinya dapat di lakukan dan sekolah dapat menyesuaikan apa yang memang di rasa dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Senada dengan hasil tersebut (Burke, 2005) (Prastyawan, M., & Y., 2017) (Wibowo, 2016) menyatakan dengan memberikan pembelajaran yang telah di sesuaikan dengan jenis pekerjaan yang ada di industri, sehingga terjadi kesesuaian antara penyiapan dan kebutuhan. Sedangkan di SMK P kerjasama antara sekolah dengan industri dalam pemilihan kompetensi belum terlaksana dengan berbagai kendala seperti industri yang kurang merespon akan ajakan sekolah terkait membahas rencana yang dilakukan dalam pelaksanaan prakerin. kurangnya kesadaran pihak industri dalam menjalin kerjasama dengan sekolah maka akan berdampak pada lulusan yang tidak siap pakai Pihak dunia perindustrian harus sadar bahwasanya mereka tidak akan memperoleh pekerja siap pakai sesuai kebutuhan dengan kriteria tertentu apabila tidak menjalin program kerja sama dengan lembaga pendidikan (DIHK-Bildungs-GmbH-IHK trainer Jerman, 2018). Dikarenakan kurangnya keterlibatan pihak industri dalam perencanaan prakerin yang berdampak pada kesulitan sekolah dalam penyesuaian kompetensi yang dibutuhkan DU/DI sesuai SOP pada job diskripsi industri, sehingga peserta didik kesulitan dalam beradaptasi sesuai iklim budaya industri. Hal tersebut juga di sampaikan oleh (Hariyati, 2018) bahwa SMK sering mengalami hambatan dalam memperoleh informasi terkait dengan kebutuhan DUDI yang di akomodasi oleh pihak sekolah. Hasil penelitian Nurhadi dalam (Irwanto, 2019) menjeleklaskan bahwa pesifikasi magang industri harus selalu di mengikuti perkembangan sesuai dengan keterbaharuan di industri.

Penetapan industri dilakukan setelah sekolah melakukan pemilihan kompetensi dengan cara analisis KD dan topik-topik pembelajaran pada matapelajaran, dengan dilanjutkan melakukan penetapan industri yaitu dilakukan dengan cara menentukan institusi pasangan (DUDI) yang sesuai dengan hasil pemilihan kompetensi berupa KD dan topik-topik pembelajarannya akan dilaksanakan di industri (Dikmenjur, 2018). Sesuai dengan keterangan di atas pada dasarnya pelaksanaan penetapan DUDI dapat berjalan dengan baik apabila perencanaan dalam pemilihan kompetensi sudah berjalan semestinya. Dalam menentukan industri setidaknya terdapat beberapa kriteria seperti perusahaan yang memiliki badan hukum yang jelas (legal), menerapkan peraturan yang melindungi tenaga kerja, menerapkan kontrak yang jelas dan menjamin keselamatan kerja (Sukardi & Hargiyarto, 2007). Di SMK P sesuai pernyataan temuan pada pemilihan kompetensi pada dasarnya belum terlaksana yang tentunya tidak dapat melakukan penetapan DUDI apabila merujuk pada pedoman praktik kerja lapangan yang dibuat oleh Dikmenjur. Maka dari itu sesuai temuan peneliti bahwa pelaksanaan penetapan industri di SMK P, sekolah dalam menentukan DUDI sebagai institusi pasangan tidak ada tolok ukur kompetensi dasar sehingga berdampak pada ketidaksesuaian penetapan DUDI. Sedangkan di SMK M dengan terlaksananya pemilihan kompetensi sekolah dapat mengukur DUDI sebagai institusi pasangan sesuai kebutuhan KD, sehingga akan berdampak pada kesesuaian kebutuhan pembelajaran KD. Dengan jalinan kemitraan tersebut maka celah (*gap*) kompetensi yang tidak terpenuhi dalam kegiatan pembelajaran dan pelatihan dapat berkurang (GIZ, 2016) dan (Ratnata, 2010).

Penyusunan program prakerin sebagai bagian integral dari program pembelajaran perlu memperhatikan kesiapan institusi pasangan dalam melaksanakan pembelajaran terkait KD, agar dalam pelaksanaan penempatan peserta didik tepat sasaran sesuai dengan KD yang akan di pelajari. Dalam hal ini penyusunan program terdapat pemetaan kompetensi dasar, topik pembelajaran atau pekerjaan, nilai-nilai karakter yang akan didapat, urutan waktu pelaksanaan dan tempat DUDI (Dikmenjur, 2018). Hasil yang di dapatkan peneliti dalam penyusunan program di SMK P dan SMK M bahwa menunjukkan adanya kerjasama. Namun dari keterangan yang di dapatkan peneliti dari kedua sekolah tersebut penyusunan program tidak bisa dilaksanakan dengan dalih sekolah yang tidak berani mengatur atau mendikte industri untuk program-program yang akan dilaksanakan siswa karena job atau pekerjaan yang dilakukan di industri tidak menentu. Pada dasarnya job atau pekerjaan yang di lakukan siswa di industri masih sesuai dengan apa yang diinginkan seperti KD sudah cukup, tentunya harus terjalin MoU sekolah dengan industri. Menurut (Sunardi, 2017) Perencanaan program prakerin harus dilakukan bersama-sama antara pihak sekolah dengan industri terutama terkait masalah penjadwalan, kesesuaian kompetensi produktif di sekolah dengan kompetensi kerja di Industri, standar operasional prosedur, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi hasil prakerin. sejalan dengan pendapat di atas menurut (Atmawati, Samsudi, & Sudana, 2017) menyatakan penyusunan rencana Praktek Kerja industri meliputi persiapan pihak sekolah dengan dunia industri, pedoman pelaksanaan Praktek Kerja industri, jumlah guru pembimbing, jumlah instruktur, daftar peserta didik yang mengikuti Praktek Kerja industri, jadwal kegiatan Praktek Kerja industri, buku agenda, presensi peserta didik dan guru pembimbing, jadwal dan materi pembekalan, lembar penilaian Praktek Kerja industri, format laporan Praktek Kerja industri serta penyampaian informasi kepada wali murid mengenai Praktek Kerja industri.

Pembekalan peserta prakerin dilakukan terhadap peserta yang akan melaksanakan pratek kerja industri. Pembekalan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan di industri. Sekurangnya dalam penyampaian pembekalan mencakup karakteristik budaya kerja atau nilai karakter budaya industri, tata aturan kerja di industri, penyusunan jurnal, pembuatan dokumen portopolio dan penilaian prakerin (Dikmenjur, 2018). Di SMK P dan SMK M pembekalan praktik kerja industri telah dilaksanakan. Pelaksanaan pembekalan tersebut terlihat telah terlaksana dengan baik dengan informasi yang didapatkan peneliti serta dukungan dokumen dari sekolah. Didalam pelaksanaan tersebut sekolah telah menyampaikan apa yang memang di butuhkan terkecuali penyampaian terkait proses penilaian yang dilakukan di industri. Sering diabaikannya proses penyampaian penilaian dalam pembekalan tersebut yang pada dasarnya informasi tersebut sangat diperlukan siswa praktikan agar saat pelaksanaan prakerin siswa dapat mengetahui bahwa hal apa saja yang dinilai. Dari hasil penilaian yang didapatkan, siswa dapat mempelajari serta mengevaluasi hal mana saja yang kurang dari hasil pelaksanaan prakerin. Hal tersebut juga disampaikan oleh (Susana, 2016) bahwa hal-hal yang harus di sampaikan saat pembekalan adalah aktifitas buku agenda prakerin, kompetensi yang diharapkan dilaksanakannya prakerin, penilaian, pembuatan laporan, sertifikat, etika sopan santun dan cara berpakaian atau berpenampilan. Dari kurangnya penyampaian materi di atas peneliti juga menemukan bahwa proses pembekalan yang ada pada kedua sekolah tersebut belum melibatkan pihak industri atau tidak adanya kerjasama sekolah dengan industri dalam penyampaian terkait pembekalan.

Pada dasarnya apabila sekolah mendatangkan guru tamu dari industri maka terdapat pengaruh yang positif, seperti meningkatnya antusias siswa dalam belajar (Firdaus, 2018). Upaya yang dilakukan sekolah untuk mendatangkan pihak industri dalam penyampaian tersebut telah dilakukan, akan tetapi industri kurang merespon dengan dalih mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Problem tersebut terdapat pada pelaksanaan prakerin yang lalu, namun peneliti mendapatkan informasi bahwa di SMK M untuk pelaksanaan pembekalan prakerin kedepan telah mendapatkan respon dari industri untuk dapat menghadiri pembekalan peserta prakerin. Dengan terciptanya kerjasama sekolah dengan industri, celah atau gap yang akan disampaikan kepada peserta prakerin dalam pembelajaran dan pelatihan dapat berkurang (Ratnata, 2010).

Penetapan pembimbing prakerin terdiri dari pembimbing sekolah dan pembimbing industri. Pembimbing dari pihak sekolah adalah guru yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran kompetensi yang pembelajarannya dilaksanakan di institusi pasangan, dan pembimbing industri yang sekaligus instruktur yang mengarahkan peserta prakerin dalam menentukan pekerjaan di institusi pasangan. Proses penetapan pembimbing di SMK P pada pembimbing sekolah dilakukan dengan lebih memprioritaskan jarak tempuh antara tempat prakerin dengan rumah pembimbing dari sekolah, tanpa melihat kesesuaian

kompetensi. Dengan melihat jarak tempuh tersebut dimaksudkan agar dapat memudahkan pembimbing dalam pelaksanaannya. Adapun hal-lain bahwasanya dari keterlaksanaannya pembimbingan pada periode sebelumnya sekolah juga mengevaluasi dari kinerja pembimbing tersebut. Apabila dari keterlaksanaannya pembimbingan dirasa kurang maka akan ada pengurngan porsi pembimbingan. Untuk penentuan pembimbing di industri tidak ada prosedur khusus dan dapat bergantian antara kepala manajemen yang ada di industri atau kepala bengkel. Hal tersebut dimaksudkan karena keberadaan dari kepala manajemen ataupun kepala bengkel yang tidak menentu, jadi bisa di katakana bahwa siapa saja yang ada di industri dapat menjadi posisi pembimbing siswa. Sedangkan penentuan pembimbing yang ada di SMK M tidak terdapat pemilihan secara khusus, akan tetapi sekolah lebih memprioritaskan kesesuaian kompetensi meskipun terdapat banyak pembimbing yang tidak sesuai kompetensi. Terdapat pembimbing yang tidak sesuai kompetensi dikarenakan kurangnya guru yang sesuai kompetensinya. Pada dasarnya apabila pembimbing tersebut sesuai dengan kompetensi yang dibimbing maka akan mengetahui dan sangat paham dengan kegiatan yang dilakukan siswa selama prakerin (Edi, Suharno, & Widiastuti, 2017b). Dengan proses pelaksanaan bimbingan yang benar maka akan memberikan kesempatan untuk mendapati potensi diri yang ada pada siswa itu sendiri (Arnawa, 2012) dan (Nurhaniah & Jaedun, 2013). Untuk penentuan pembimbing yang ada di industri sekolah telah menyerahkan kewenangannya kepada industri di dalam menentukannya. Hal yang didapatkan oleh peneliti dari industri sendiri yang sudah berjalan sejak lama bahwa dalam penentuan pembimbingan tidak terdapat penentuan secara khusus, akan tetapi siapa yang menjadi kepala mekanik itulah yang akan menjadi pembimbing siswa prakerin. Hal yang didapatkan peneliti dari kedua sekolah tersebut bahwasanya tidak ada cara khusus atau prosedur dalam penentuan pembimbing, sedangkan menurut (Tripati & Chaurasia, 2014) penetapan pembimbing harus dipilih dan dilatih. Dengan di pilih dan dilatihnya pembimbing maka akan sangat berdampak pada ketercapaian prakerin.

Kerjasama sekolah dengan industri dalam pembimbingan praktek kerja industri

Kerjasama sekolah dengan industri dalam perencanaan terbagi menjadi lima sub-indikator yaitu penyusunan jurnal prakerin, Monitoring prakerin dan dokumentasi portopolio. Selama melakukan kegiatan pembelajaran di instuti pasangan peserta prakerin wajib menyusun jurnal kegiatan prakerin. Pada dasarnya pembuatan jurnal ini di buat selengkap mungkin sesuai dengan topik-topik pembelajaran atau jenis pekerjaan dan tugas yang telah di berikan pembimbing industri serta di lengkapi catatan-catatan kejadian penting selama kegiatan prakerin. kegiatan tersebut tentunya sangat bergantung pada pembimbing industri maupun sekolah. Penyusunan jurnal yang ada di SMK P terdapat kerjasama antara sekolah dengan industri dalam bentuk sekolah yang menyediakan format kosong atau kolom yang dapat di isi sesuai pekerjaan serta tempat tandatangan pembimbing industri. Proses pembimbingannya sendiri telah dilakukan sekolah sejak awal saat pelaksanaan pembekalan dan pada saat prakerin atau pada waktu pengisian jurnal, pembimbingan tersebut dilakukan oleh industri dengan cara memantau kepastian pekerjaan yang dituliskan siswa di buku jurnal serta menandatangani. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Atmawati et al., 2017) bahwa pembimbing industri mengecek jurnal harian siswa dan mendatanganinya. Sedangkan pembimbing dari sekolah sendiri hanya memastikan tidak terjadinya masalah, selalu mengingatkan dan mengecek apakah siswa telah melakukan pengisian jurnal. Di SMK M juga terdapat kerjasama sekolah dengan industri dengan bentuk industri yang telah menyiapkan indikator-indikator pekerjaan yang dapat di kerjakan siswa saat pelaksanaan prakerin agar dapat di pilih oleh sekolah dan dapat di masukkan kedalam jurnal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Dari hasil pemilihan indikator tersebut sekolah menyediakan bentuk jurnal dengan indikator-indikator pilihan dan kolom-kolom angka keterangan jumlah pekerjaan di hari tersebut serta kolom tandatangan pembimbing. Proses pembimbingannya sendiri dilakukan oleh pembimbing dari sekolah maupun dari industri. Pembimbing dari sekolah yang memastikan keterlaksanaan pengisian jurnal atau kendala-kendala yang di hadapi siswa saat pengisian jurnal serta pembimbing industri yang memastikan kebenaran isi pekerjaan yang dilakukan siswa. Dalam pelaksanaan pembimbingan dibutuhkan kerjasama antra pembimbing sekolah dengan pembimbing industri untuk membahas kesepakatan tentang pelaksanaan pembimbingan saat pelaksanaan prakerin, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan adanya pelaksanaan pembimbingan dari sekolah dan industri (Priyatama & Sukardi, 2013). Namun dari temuan peneliti bahwasanya pekerjaan yang di tulis siswa tersebut dilakukan oleh mekanik industri, sedangkan siswa mendampingi atau membantu mekanik. Sedangkan menurut (Faizal, Burhanuddin, & Sultoni, 2018)selama mengerjakan itu, siswa di amati prosedur dan cara kerjanya apakah sesuai dengan standar kerja yang berlaku serta dinilai hasil kerjanya.

Monitoring sendiri dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan mutu pelaksanaan prakerin. lingkup monitoring sendiri meliputi penempatan, penyusunan program prakerin, keterlaksanaan program prakerin, intensitas pembimbingan, permasalahan selama peserta didik melaksanakan prakerin (Dikmenjur, 2018). Pelaksanaan monitoring pada SMK P dan SMK M dilakukan oleh pembimbing dari sekolah yang semua kegiatan siswa pada saat pelaksanaan prakerin telah menjadi tanggung jawab pembimbing. Hal tersebut senada dengan pendapat (Iktiari & Purnami, 2019) bahwa setiap siswa prakerin akan mendapat pembimbing dari sekolah yang akan memonitoring, membimbing dan memberikan dukungan kepada peserta prakerin. Temuan penelitian yang ada di kedua sekolah memperlihatkan bahwa pada SMK P tidak terdapat kerjasama dan SMK M terdapat kerjasama. Pada SMK P pelaksanaan monitoring telah dilakukan pembimbing dari sekolah dengan waktu pelaksanaan yang tidak menentu tergantung kebutuhan atau adanya masalah yang dihadapi siswa saat pelaksanaan prakerin. Informasi yang didapatkan peneliti dari pembimbing industri terkait monitoring sendiri, pembimbing tidak mendapatkan arahan dalam memonitoring siswa sedangkan monitoring sendiri menurut (Faizal et al., 2018) bahwa tujuan monitoring untuk melihat perkembangan siswa-siswi selama melakukan prakerin dan mengawasi tingkah laku siswa saat berada di tempat industri, yang

tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pembimbing dari sekolah karena pelaksanaan prakerin sendiri di lakukan di industri dan harusnya hal-hal yang berkaitan dengan monitoring dapat di ketahui oleh pembimbing dari industri karena merekalah yang setiap hari berada bersamaan. Sebaliknya di SMK M terkait monitoring terdapat kerjasama dengan industri dalam hal apa saja atau poin-poin yang masuk dalam monitoring di sampaikan kepada pihak industri dan selanjutnya dalam pelaksanaannya pembimbing industri dapat menyampaikan hal tersebut lewat media sosial. Senada dengan temuan tersebut menurut (Faizal et al., 2018) monitoring dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat berkunjung secara langsung ke industri yang dapat di jangkau sekolah dan menggunakan komunikasi via telepon untuk industri yang berada diluarkota atau luar provinsi.

Dari hasil temuan penelitian bahwa dokumentasi portopolio yang ada di SMK P terdapat pembimbingan sejak awal dari pelaksanaan pembekalan untuk diberi arahan-arahan terkait pembuatannya. Pada implementasinya sesuai temuan peneliti bahwa pembimbing sekolah hanya memastikan siswa telah melakukan pembuatan dokumentasi portopolio dan memastikan kesesuaian isi didalamnya. Sedangkan pembimbing dari industri memastikan kesesuaian isi dalam dokumen tersebut apakah sesuai dengan apa yang siswa dapatkan saat pelaksanaan prakerin. Senada dengan temuan tersebut menurut (Priyatama & Sukardi, 2013) kesepakatan antara pembimbing sekolah dengan pembimbing industri sangat di perlukan dalam pelaksanaan prakerin, salah satu langkah yang di tempuh adalah dengan adanya pelaksanaan pembimbingan dari pihak sekolah dan industri. Hasil tersebut menggambarkan bahwa terdapat kerjasama sekolah dengan industri dalam pembuatan dokumentasi portopolio dengan sekolah yang telah memberikan arahan dalam pembuatan dan industri yang memastikan kesesuaian isi dokumen tersebut. Sedangkan di SMK M pembuatan dokumentasi portopolio dilakukan dengan bentuk tulis tangan pada lembar terakhir jurnal prakerin yang telah disediakan sekolah. Pembimbingan terkait dokumen ini juga dilakukan sekolah pada saat pembekalan sebelum pelaksanaan prakerin dengan memberikan gambaran dan pengertian isi dokumen tersebut. Pada implementasinya proses pembimbingan dilakukan oleh pembimbing sekolah maupun pembimbing industri. Pembimbing sekolah yang memberikan arahan dalam tata tulis, isi dokumen serta masalah yang dihadapi siswa sedangkan pembimbing industri yang memastikan kesesuaian isi di dalam dokumen dengan realita dilapangan. Dengan kata lain kerjasama antara pembimbing atau sekolah dengan industri sudah terjalin didalam proses pembuatan dokumentasi portopolio. Menurut (Widiyanto, 2013) menjelaskan, dengan keterlibatan industri secara langsung dalam maka kesenjangan dalam pelaksanaannya dapat diminimalisasi.

Kerjasama sekolah dengan industri dalam penilaian praktek kerja industri

Kerjasama sekolah dengan industri dalam penilaian terbagi menjadi lima sub-indikator yaitu penilaian pembimbing, sertifikat industri dan pelaporan nilai. Hal ini sesuai yang diungkapkan pada konggres tentang *Technical and Vocational Education and Training* menyatakan bahwa sekolah menengah kejuruan harus mempunyai strategi khusus antara lain memiliki 4 aspek (1) kebutuhan analisis, (2) seleksi dan urutan kompetensi, (3) pengembangan instruksional, dan (4) evaluasi pembelajaran, yang akan menjadi bekal dalam meniti karir

Penilaian hasil belajar peserta didik di institusi pasangan dilakukan oleh pembimbing industri dan untuk instrumen penilaiannya disediakan oleh sekolah. Cakupan penilaian tersebut sekurang-kurangnya mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan (Dikmenjur, 2018). Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar adalah sama dengan penilaian hasil belajar di sekolah dengan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan digabungkan menggunakan formula tertentu yang di tetapkan satuan pendidikan. Didalam melaksanakan proses penilaian terhadap siswa, sekolah diharuskan memiliki strategi khusus karena hasil tersebut nantinya akan menjadi bekal dalam meniti karir (Triyono, 2015). Penilaian yang ada di SMK Pancasila dan SMK M terdapat kerjasama dalam proses penilaian antara sekolah dengan industri. Bentuk kerjasamanya adalah dengan pembuatan indikator penilaian yang dibuat sekolah dan pelaksanaan penilaiannya dilakukan oleh industri atau pembimbing yang mewakili industri. Indikator tersebut terdapat aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap yang di tuangkan pada buku penilaian dengan sub-indikator tertentu dan cara penilaian berbeda sesuai aturan yang diberikan dari institusi sekolah. Sejalan dengan pendapat (Hababakize1 & Pardjono, 2018), (Sudiyanto, Sampurno, & Siswanto, 2017), (Atmawati et al., 2017) (Chen, Pateman, & Wang, 2018) bahwa hasil yang harus di dapatkan siswa saat pelaksanaan prakerin adalah keterampilan, pengetahuan dan sikap. Pendapat tersebut juga di dukung oleh (Pavlova & Huang, 2012) survei yang dilakukan di Australia dan Inggris pengusaha menganggap keterampilan menjadi faktor paling penting untuk mempekerjakan lulusan.

Sesuai temuan peneliti bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan pembimbing industri dari SMK P terdapat proses penilaian yang tidak baik. Dikatakan tidak baik karena proses penilaian tersebut yang harusnya dilakukan pembimbing industri, namun dalam pelaksanaannya siswa sendiri yang melakukan penilaian, meskipun dari hasil nilai tersebut di awasi oleh pembimbing industri. Sedangkan di SMK M proses penilaian yang dilakukan pembimbing industri dapat dikatakan cukup baik. Proses tersebut dilakukan pembimbing industri dengan cara meminta pendapat dari teman mekanik atau mekanik yang diikuti peserta prakerin saat proses pekerjaan berlangsung untuk dimasukkan kedalam nilai aspek teknis, sedangkan nilai non teknis dilakukan oleh pembimbing industri sendiri dikarenakan nilai tersebut dapat diawasi secara langsung oleh pembimbingnya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Atmawati et al., 2017) bahwasanya proses penilaian dilakukan oleh pembimbing dari industri melalui pengamatan dan hasil kerja praktek yang dilakukan siswa prakerin. Sejalan dengan penilaian prakakerin menurut (Reid, 2015) industri mengharapakan lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tentang bidang profesional.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri pada pasal 10 ayat 4 menyatakan bahwa perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri memberikan sertifikat kepada peserta didik dan guru bidang studi produktif yang telah menyelesaikan prakerin atau pemagangan industri. Pemberian sertifikat juga di atur oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 tahun 2016 bahwasanya diwajibkan pemberian sertifikat sesuai dengan standart yang di tentukan industri dan apabila peserta prakerin tidak memenuhi standart kompetensi pemberian sertifikat maka dapat di berikan keterangan telah mengikuti prakerin atau pemagangan. Dari hasil temuan peneliti bahwasanya di SMK P terdapat kerjasama dalam pembuatan sertifikat, sedangkan di SMK M tidak ada kerjasama dan tidak ada pemberian sertifikat. Kerjasama yang ada di SMK P terdapat pembuatan sertifikat yang di sediakan pihak sekolah dan nilai serta tanda atau stempel yang di sediakan pihak industri. Sedangkan di SMK M peneliti mendapatkan informasi dari pengurus prakerin bahwa sekolah memberikan sertifikat dari hasil kegiatan prakerin, namun setelah peneliti telusuri serta di perkuat dokumen yang di dapatkan peneliti bahwa pemberian sertifikat di institusi ini tidak ada. Senada dengan temuan (Anugerah, Daryati, & Rosmawita³, 2017) masih banyak sekolah menengah kejuruan yang tidak memberikan sertifikat hasil prakerin. Peraturan menteri perindustrian dan peraturan menteri tenaga kerja untuk diwajibkannya pemberian sertifikat nyatanya telah diabaikan, meskipun sertifikat dapat sangat berguna di masa kelak untuk dijadikan acuan proses pencarian pekerjaan. Pentingnya pemberian sertifikat prakerin juga di sampaikan oleh (Atmawati et al., 2017) bahwa sertifikat prakerin ini berguna bagi siswa kelak saat mencari pekerjaan, karena dalam sertifikat tersebut tercantum aspek penilaian motivasi, kemampuan kerja dan kepribadian atau tingkah laku. Senada dengan hal tersebut menurut (Vogtenhuber, 2018) sertifikat keahlian dapat membuat kepercayaan diri dan kredibilitasnya meningkat karena telah memiliki parameter yang jelas akan keahlian yang dimilikinya.

Pelaporan nilai adalah predikat nilai prakerin yang merupakan kombinasi dari nilai keterampilan, pengetahuan dan sikap dengan formula yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. dari hasil nilai yang didapat saat pelaksanaan prakerin maka diintegrasikan dalam nilai mata pelajaran. Nilai mata pelajaran yang di dapat di sekolah dan di industri baik nilai keterampilan maupun pengetahuan di hitung berdasarkan nilai KD dari industri dan dari sekolah, tergantung tempat pembelajaran KD yang bersangkutan (Dikmenjur, 2018). Sesuai dari hasil penelitian bahwa pelaporan nilai yang ada di SMK P dan SMK M berjalan dengan semestinya sesuai kebijakan dari sekolah masing-masing. Sejalan dengan pernyataan di atas menurut (Suleman, 2016) terdapat berbagai metode untuk di terapkan dalam pengumpulan nilai. Di SMK P pelaporan nilai tidak terdapat kombinasi nilai sekolah dengan nilai industri. Nilai yang di ambil dan dimasukkan kedalam raport adalah nilai yang di dapat dari industri dan apabila nilai yang didapat siswa tidak sesuai standart nilai sekolah maka sekolah akan memperbaiki nilai tersebut dengan catatan siswa tidak pernah menimbulkan masalah yang berarti di sekolah. Sama halnya di SMK M pelaporan nilai dalam raport tidak terdapat nilai kombinasi dari keterampilan maupun pengetahuan, tetapi nilai yang diambil adalah murni dari industri dan apabila nilai yang didapatkan siswa tidak sesuai dengan standart kelulusan maka nilai dapat diperbaiki dengan ujian susulan atau dapat melihat dari ahklak siswa saat berada di sekolah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian (Edi, Suharno, & Widiastuti, 2017a) bahwa pada tahap penilaian prakerin di SMK P Surakarta adalah nilai murni yang didapat dari industri.

SIMPULAN

SMK P dalam menentukan kompetensi hanya sebatas proporsi dari industri yang akan dijadikan tempat prakerin, tanpa adanya komunikasi atau MoU peluang pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Ketidak beranian sekolah untuk menuntun industri menjadi faktor utama dalam hal ini, karena industri yang menjadi institusi pasangan rata-rata kelas menengah kebawah. Sedangkan pemilihan kompetensi yang ada di SMK M industri telah memberikan silabus peluang pembelajaran, sehingga sekolah dapat memilah kompetensi sesuai kebutuhan pembelajaran. Penetapan DUDI sebagai tempat prakerin di SMK P terdapat kerjasama lama dengan tidak adanya kriteria tertentu di dalam menentukan institusi pasangan, seperti peluang pembelajaran yang akan dilakukan di industri. Penambahan institusi pasangan juga bisa dilakukan apabila terdapat siswa yang mempunyai link industri yang sesuai kompetensi dan industri berada di kalangan menengah keatas. Sedangkan di SMK M langkah awal penetapan DUDI sebagai tempat prakerin, sekolah mengirimkan surat kepada main dealer Honda yang ada di sidoarjo untuk memberikan data jumlah siswa dan industri yang dipilih sesuai ketentuan sekolah. Selanjutnya, sekolah tinggal menunggu konfirmasi dari main dealer terkait industri yang dipilih tersebut karena industri-industri yang dijadikan tempat prakerin berada dalam naungan main dealer sehingga keputusan pilihan tersebut ada di *main dealer* yang ada di Sidoarjo.

Penyusunan program prakerin di SMK P hanya sebatas urutan waktu pemberangkatan, monitoring sampai akhir pelaksanaan prakerin. Pada dasarnya penyusunan program ini dimaksudkan untuk menyusun program kegiatan prakerin siswa di industri. Dengan kata lain kerjasama sekolah dengan industri hanya sebatas urutan waktu kegiatan pengantaran, pelaksanaan, sampai penjemputan siswa tanpa adanya program-program keterukuran target pembelajaran di industri. Realita tersebut sama halnya dengan penyusunan program prakerin yang ada di SMK M bahwa kerjasama sekolah dengan industri terkait penyusunan program hanya sebatas urutan waktu kegiatan-kegiatan seperti pembekalan, pemberangkatan, pembimbingan dan lainnya tanpa adanya target pembelajaran di industri. Pembekalan peserta prakerin yang ada di SMK P tidak terdapat kerjasama dengan industri dalam penyampaian terkait materi-materi yang di sampaikan. Di dalam penyampaian tersebut dilakukan oleh guru sekolah yang di anggap bisa atau berkompeten dalam isi materi tersebut. Sedangkan pembekalan peserta prakerin yang ada di SMK M untuk pelaksanaan pembekalan di periode selanjutnya terdapat kerjasama dengan industri dalam penyampaian terkait pembekalan, meskipun dalam periode sebelumnya tidak pernah ada kerjasama dalam penyampaian di karenakan upaya yang dilakukan sekolah

untuk mendatangkan pihak industri kurang direspon oleh industri. SMK P dalam menentukan pembimbing sekolah terdapat cara pembagian rata terhadap guru sekolah dengan melihat lokasi tempat praktik dan lokasi tempat tinggal guru pembimbing (tanpa melihat kesesuaian kompetensi). Sedangkan penetapan pembimbing di industri, sekolah telah menyerahkan kewenangan tersebut kepada industri dan industri dalam menetapkan pembimbing tidak terdapat kriteria tertentu. Untuk penetapan pembimbing di SMK M terdapat cara pembagian rata kepada setiap guru dengan melihat jarak tempuh antara industri dengan rumah guru (tanpa melihat kesesuaian kompetensi). Untuk penetapan pembimbing dari industri sendiri sekolah telah menyerahkan wewenang tersebut kepada industri dan dari industri sendiri menyatakan penetapan pembimbing umumnya di dasarkan atas pengetahuan tujuan dilaksanakannya prakerin dan mengetahui prosedur pelaksanaannya. Penyusunan jurnal prakerin pada kedua sekolah tersebut terdapat kerjasama dengan industri dalam proses pembimbingan. Terdapat sekolah yang menyediakan bentuk format jurnal dan terdapat bimbingan awal sebelum pelaksanaan, sedangkan pembimbing industri yang memastikan kesesuaian isi jurnal dengan pekerjaan dilapangan. Pembedanya sendiri terdapat pada bentuk format yang di berikan, di SMK P bentuk formatnya terdapat kolom-kolom kosong yang dapat di isi siswa dengan pekerjaan yang dilakukan dan di SMK M terdapat kolom beserta isi topik pembelajaran yang harus di lakukan saat pelaksanaan prakerin. Pelaksanaan monitoring di SMK P dan SMK M dilakukan oleh pembimbing sekolah dengan tujuan memastikan keterlaksanaan prakerin dari awal sampai akhir. Tentunya dalam pelaksanaannya tersebut pembimbing dari sekolah tidak dapat memantau secara langsung dikarenakan pembimbing dari industrilah yang secara langsung bersama siswa praktikan. Dari permasalahan tersebut sekolah telah bekerjasama dengan pembimbing industri untuk dapat menginformasikan permasalahan yang didapat saat pelaksanaan prakerin melalui media sosial atau langsung.

Dalam pembuatan dokumentasi portopolio yang ada di SMK P dan SMK M telah dilakukan bimbingan awal saat proses pembekalan, sehingga pada saat pelaksanaannya siswa tidak perlu lagi diberikan arahan-arahan terkait dokumentasi portopolio. Di dalam pelaksanaannya sekolah telah bekerjasama dengan pembimbing industri dalam pengawasan dan kesesuaian isi yang di buat siswa. Dari pengawasan tersebut apabila terdapat masalah-masalah yang industri tidak bisa tangani maka pembimbing industri dapat secara langsung menginformasikan kepada pembimbing sekolah. Pelaksanaan penilaian yang ada di SMK P dan SMK M terdapat kerjasama dengan industri seperti sekolah yang telah menyediakan bentuk format penilaian dan industri sebagai penilainya. Bentuk format tersebut terdapat aspek teknis dan non teknis yang nantinya dijadikan acuan pembimbing industri untuk dapat menilai siswa. Dari implementasi penilaiannya sendiri terdapat kurangnya komunikasi antara sekolah dengan industri sehingga berdampak pada proses pengambilan nilai yang kurang baik. Pemberian sertifikat setelah pelaksanaan prakerin telah dilakukan di SMK P dengan sekolah yang menyediakan sertifikat dan industri yang menyediakan tanda stempel atau tandatangan pembimbing. Untuk nilai sertifikat, sekolah mengambil nilai murni dari hasil pelaksanaan prakerin yang telah didapatkan siswa, sedangkan di SMK M tidak terdapat pemberian sertifikat hasil prakerin. Pelaporan nilai yang ada di SMK P dan SMK M telah berjalan semestinya yang nilai tersebut didapatkan dari industri dan didapatkan pembimbing sekolah serta di serahkan kepada pihak sekolah yang bertugas memasukkan nilai kedalam rapot. Dalam memasukkan nilai kedalam rapot bilamana terdapat nilai yang dirasa kurang baik atau di bawah standart yang ditentukan sekolah, maka sekolah akan menganalisis penyebab terjadinya hal tersebut. Dari hasil analisis tersebut apabila terdapat sikap siswa yang tidak baik di industri dengan alasan yang kurang meyakinkan maka siswa tersebut bisa mengulang pelaksanaan prakerin atau dinyatakan tidak lulus. Apabila terdapat alasan yang bisa di tolelir maka perbaikan nilai dapat terjadi sehingga siswa dinyatakan lulus.

Melihat kurang efektifnya kerjasama sekolah dengan industri dalam prakerin yang disebabkan kurangnya komunikasi menjadikan pelaksanaan prakerin kurang optimal. Sehingga komunikasi antara sekolah dengan industri harus dibangun dari sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan saat akhir pelaksanaan prakerin agar program-program yang dilakukan pada saat prakerin jelas dan dapat mencapai tujuan dari diselenggarakannya prakerin. Guru pembimbing diharapkan dapat berperan secara aktif dalam proses pelaksanaan prakerin sehingga kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan prakerin dapat terselesaikan. Komunikasi juga perlu dibangun lebih terkait prosedur-prosedur pelaksanaan prakerin agar dapat berjalan semestinya dan dari komunikasi tersebut guru pembimbing dapat mengambil banyak pelajaran tentang kekurangan kompetensi siswa sebelum pelaksanaan prakerin yang nantinya dapat disampaikan di sekolah sehingga siswa ketika masuk di DUDI dapat mudah beradaptasi dan guru pembimbing dapat mendapatkan wawasan terkait DUDI sehingga dapat di terapkan di sekolah.

Sebagai industri haruslah peka sebagai pemangku kepentingan guna memperoleh tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan jenis pekerjaan. Pembelajaran di sekolah yang di desain sebagaimana di industri dengan berbagai kekurangan yang menjadikan pelaksanaan prakerin tersebut diadakan yang harusnya industri dapat memberikan kontribusi yang nyata sehingga harapan lulusan yang kompeten tersebut dapat tercapai. Dari hasil lulusan yang sesuai tersebut harapan beasiswa dari industri juga diperlukan agar nantinya lulusan tersebut dapat berkontribusi di industri maupun di sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Amrozi., & Mukhadis, A. (2011). Kesesuaian Sarana Prasarana, Kompetensi Guru, Manajemen, dan Proses Praktikum Prodi Keahlian Teknik Otomotif SMK Ditinjau dari Standar Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005. *Teknologi dan Kejuruan*, 34(1).
- Anugerah, D., Daryati., & Rosmawita. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Prakerin Berdasarkan Pedoman Prakerin di SMKN 3 Depok Program Keahlian Batu & Beton. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil*, 6(1).
- Arnawa, I. K. (2012). Determinasi Latihan Kerja, Kompetensi Kewirausahaan dan Bimbingan Karir terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK Negeri Kelompok Teknologi dan Rekayasa di Kabupaten Buleleng.
- Atmawati, Samsudi, & Sudana, I. M. (2017). Keefektifan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Berbasis Industri pada Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video. *Journal of Vocational and Career Education*, 2(2), 1—8.
- Bailey, P. J. (2013). Globalization and Chinese Education in the Early 20th Century. *Front. Educ. China*, 8(3), 398—419.
- Burke, J. (2005). *Competency Based Education and Training*. (A member of the Taylor & Francis Group) London New York Philadelphia: The Falmer Press.
- Chen, P. S. L., Pateman, H., & Wang, G. (2018). Employability Skills of Maritime Business Graduates: Industry Perspectives. *IAMU SECTION*.
- Edi, S., Suharno, & Widiastuti, I. (2017a). Pengembangan Standar Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa SMK Program Keahlian Teknik Pemesinan di Wilayah Surakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Kejuruan (JIPTEK)*, X(1).
- Edi, S., Suharno, & Widiastuti, I. (2017b). Pengembangan Standar Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa SMK Program Keahlian Teknik Pemesinan di Wilayah Surakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Kejuruan*, X(1).
- Efendi, S., Sutadji, E., & Mukhadis, A. (2012). Pencapaian Kompetensi Prakerin Ditinjau dari Persepsi Siswa tentang Kualifikasi Tempat, Pembimbingan, dan Umpan Balik pada Keahlian Teknik Mesin SMK. *Teknologi dan Kejuruan*, 35(2), 115—124.
- Faizal, A. N., Burhanuddin, & Sultoni. (2018). Manajemen Praktek Kerja Industri. *Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 139—149.
- Firdaus. (2018). Manfaat Guru Tamu untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kelas XI Teknik Sepeda Motor SMK YPTN Bangkinang Kota. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2(2), 205—216.
- Habanabakize1, T., & Pardjono. (2018). The Competence of Graduates in Machining Technology Vocational High Schools Based on National Practical Exam in Yogyakarta, Indonesia. *American Journal of Educational Research*, 6(6), 840-844.
- Hariyati, N. (2018). Manajemen Kerjasama Sekolah dengan Industri Dalam Implementasi Teaching Factory di Sekolah. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 8(2), 70—79.
- Iktiari, R., & Purnami, S. (2019). Manajemen Praktik Kerja Industri untuk Meningkatkan Keterserapan Lulusan SMK pada Dunia Usaha dan Dunia Industri. *Jurnal Media Manajemen Pendidikan*, 2(2), 2622—3694.
- Irwanto. (2019). Kompetensi Guru Vokasi SMK di Era Revolusi Industri 4.0. *Keguruan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 182—204.
- Jannah, U. M., Suswanto, H., & Handayani, A. N. (2016). Kesiapan Kerja di Perusahaan ISP, Ditinjau dari Pencapaian Kompetensi Administrasi Server Jaringan dan Pelaksanaan Prakerin bagi Siswa SMK Paket Keahlian TKJ. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 1(6), 1137—1147.
- Jarvie. (2012). Qualitative Research in Early Childhood Education and Care Implementation. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 6(2), 35—43.
- Jatmoko, D. (2013). Relevansi Kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan terhadap Kebutuhan Dunia Industri di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(1).
- Kolmos, A., & Holgaard, J. E. (2018). Employability in Engineering Education: Are Engineering Students Ready for Work. *Philosophy of Engineering and Technology*, 32, 499-518.
- Nurhaniah, N., & Jaedun, A. (2013). Peran Prestasi Belajar dan Pengetahuan tentang Dunia Kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK Negeri Jurusan Bangunan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil*.
- Oktaviastuti, B., Dardiri, A., & Nindyawati. (2016). Meningkatkan Technical Skill Siswa SMK Teknik Bangunan melalui Pelaksanaan Praktek Kerja Industri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1(4), 681—685.
- Pavlova, M., & Huang, C. L. (2012). Advancing Employability and Green Skills Development: Values Education in TVET, the Case of the People's Republic of China. *Concerns and Prospects*, 19.
- Ponnan, R., & Ambalavanan, B. (2014). Innovations for a Broadcasting Curriculum to Meet Workplace Expectations. *Social and Behavioral Sciences*, 123, 160—169.
- Prastyawan, Y. I., M., & Y., H. A. (2017). Manajemen Pembelajaran Berbasis Industri. *Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 1(2), 176—180.
- Priyatama, A. A., & Sukardi. (2013). Profil Kompetensi Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di Kota Pekalongan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(2).
- Ratnata. (2010). Konsep Pemikiran Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi untuk Menghadapi Tuntutan Dunia Kerja. Asosiasi Pendidikan Tegnologi dan Kejuruan Indonesia.

- Reid, A. (2015). Translating Experience A Framework for Developing Graduate Employability AARE Conference, 1-13.
- Stevani. (2015). Pengaruh Praktik Kerja Industri (Prakerin), Keterampilan Siswa dan Self Efficacy terhadap Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Siswa Administrasi Perkantoran SMK Negeri Bisnis dan Manajemen Kota Padang. *ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education*, 3(2), 184-193.
- Sukardi., & Hargiyarto, P. (2007). Peran Bursa Kerja Khusus sebagai Upaya Penempatan Lulusan SMK Dalam Rangka Terwujudnya Link and Match antara Sekolah dengan Dunia Industri. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 16(2).
- Suleman, F. (2016). Employability Skills of Higher Education Graduates: Little Consensus on A Much-Discussed Subject. *Social and Behavioral Sciences*, 228, 169—174.
- Sunardi. (2017). Pengelolaan Praktik Kerja Industri di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Sukoharjo. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 96—104.
- Susana, N. (2016). Pengelolaan Praktik Kerja Industri. *Manajemen Pendidikan*, 10(6), 579-587.
- Tripati, R., & Chaurasia. (2014). Analysis and Evaluation of Training Method. *IRC'S International Journal of Multidisciplinary Research In Social & Management Sciences*, 2(2), 2320-8236.
- Triyono, B. (2015). The Indicators of Instructional Design for E- Learning in Indonesian Vocational High Schools. *Journal Social and Behavioral Sciences*, 54—61.
- Vogtenhuber, S. (2018). The Institutional Conditions of Inequality in Credential and Skill Attainment and Their Impact on Occupational Placement. *Research in Social Stratification and Mobility*, 55, 13—24.
- Wibowo, N. (2016). Upaya Memperkecil Kesenjangan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Tuntutan Dunia Industri. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 23(1).
- Widiyanti, Solichin, & Yoto. (2017). Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan dan Industri (Studi Kasus Pendidikan Kelas Industri SMK Nasional Malang dengan Astra Honda Motor). *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*, 40(2), 181—192.
- Widiyanto. (2013). Strategy of Increasing the Competence of Graduates of Vocational High School Majoring in Business and Management Based Business and Industrialized. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 3(6), 25-30.
- Yoto., & Widiyanti. (2017). Vocational High School Cooperation with P.T. Astra Honda Motor to Prepare Skilled Labor in Industries. *International Journal of Environmental & Science Education*, 12(3), 585—596.
doi:10.12973/ijese.2017.1249.